



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SONDANG WIDYA ESTIKASARI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **465275**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.011.067.000**

1. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 900.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.667.000
3. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **220.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA DIESEL Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **62.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **2.849.529**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **226.040.302**

F. HARTA LAINNYA Rp. **121.037.885**

Sub Total Rp. **3.642.994.716**

III. HUTANG Rp. **130.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **3.512.994.716**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.